

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kondisi ekonomi global yang cenderung melambat serta belum terarah tujuannya membuat perusahaan dirasa harus menemukan cara alternatif untuk terus bertahan dalam persaingan industri guna menjaga keberlangsungan hidupnya (*going concern*). Data yang dirilis oleh The World Bank tahun 2015 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inkonsisten mendukung pernyataan bahwa dunia perekonomian yang tercermin pada tingkat aktivitas operasi perusahaan harus terus berinovasi agar terus berjalan pada porosnya. Manajemen perusahaan yang cermat akan dengan sigap mencari celah atas persoalan tersebut serta mengidentifikasi hal-hal yang dirasa dapat menopang seluruh aktivitas perusahaan dengan optimal, namun seiring perkembangan zaman, aspek *financial capital* saja dirasa tidak cukup untuk menjadi solusi terbaik dalam menunjang kegiatan bisnis perusahaan dikarenakan para pemilik modal enggan mengambil resiko dengan menanamkan tambahan modal disaat kondisi perekonomian yang sedang tidak stabil. Oleh sebab itu, perusahaan terus melakukan analisa serta mengevaluasi setiap aspek yang dapat dijadikan solusi untuk masalah tersebut.

Pengevaluasian aspek-aspek yang mendorong peningkatan ekonomi perusahaan turut dibantu oleh inovasi-inovasi yang diciptakan seiring dengan terciptanya *disruptive era*. Kasali (2017, hlm. 27) menyatakan bahwa *disruption* adalah sebuah inovasi. Inovasi inilah yang kemudian menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru yang menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dan lebih bermanfaat. Era ini membutuhkan *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing*. *Disruptive innovation* menciptakan pasar baru atau mengubah yang telah ada dengan menawarkan kemudahan, aksesibilitas, dan keterjangkauan (Leavy & Sterling 2010, hlm. 7).

Knowledge-based asset atau yang biasa disebut modal intelektual memperkenalkan sebuah sistem berupa penilaian yang difokuskan pada pengetahuan yang dimiliki dan kontribusinya terhadap aspek penciptaan nilai perusahaan. Meski telah menjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai

pengaruh modal intelektual dalam penciptaan nilai perusahaan, ternyata hingga saat ini modal intelektual masih menjadi salah satu faktor yang berpengaruh, terlebih lagi dengan adanya dorongan perusahaan untuk menciptakan karyawan dengan kompetensi yang mumpuni, baik dari segi etos kerja maupun penguasaan teknologi. Sukhija (2016) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menuntun perusahaan di era baru digital adalah dengan menjadikan karyawan sebagai “*organization’s secret weapon*”. Sebagaimana dijelaskan selanjutnya, bahwa karyawan merupakan “*the true intellectual capital*” dalam setiap perusahaan, yang berarti bahwa setiap bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut harus dapat membuat karyawan menjadi katalis untuk membantu mengarahkan perubahan digital. Chen *et al.*, (2005) menyatakan bahwa investor akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki tingkat modal intelektual yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat modal intelektual yang rendah.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan menurut Kategori Lapangan Usaha di Indonesia, 2016

Lapangan Usaha	Satuan: Orang
A. Pertambangan dan Penggalian	935,753
B. Industri Pengolahan	15,999,907
C. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin	196,542
D. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi	248,185
E. Konstruksi	3,832,432
F. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	22,369,399
G. Pengangkutan dan Pergudangan	2,468,245
H. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8,417,604
I. Informasi dan Komunikasi	1,186,072
J. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,720,556
K. Real Estat	757,695
L,M. Jasa Perusahaan	1,751,280
N. Pendidikan	6,442,141
O. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,557,485
P,Q,R. Jasa Lainnya	2,437,170
Jumlah	70,320,466

Sumber: Data Sensus Ekonomi 2016 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia tergolong tinggi, dengan jumlah tersebut perusahaan dapat mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai perusahaan. Modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern, penggabungan dua aspek penting seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dengan perkembangan teknologi yang ada pada era *disruptive* seharusnya tidak menghambat pemanfaatan modal intelektual, terkhusus dalam menghadapi kendala dalam pengungkapan informasi. Informasi mengenai modal intelektual saat ini sudah dapat ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan maupun laporan berkelanjutan perusahaan. Dengan menerbitkan laporan tersebut, kinerja perusahaan akan nampak lebih baik dan sudah seharusnya perusahaan *go public* memperhatikan dan meningkatkan kualitas laporan tahunan untuk memperoleh kepercayaan investor seutuhnya. Hal ini sejalan dengan yang dikutip oleh Suhardjanto dan Wardhani (2010), yang menyatakan bahwa pendekatan yang pantas digunakan untuk meningkatkan laporan tahunan adalah dengan mendorong peningkatan pengungkapan informasi modal intelektual.

Perusahaan besar dengan jumlah aset serta aktivitas operasional yang tinggi akan menjadi sorotan para pemangku kepentingan perusahaan, dengan adanya tekanan untuk bersikap transparan, maka perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan semua informasi demi menjaga integritas perusahaannya serta mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik. Survey global yang dilakukan oleh *PriceWaterhouseCoopers* dan *Taylor and Associates* pada tahun 1998 menunjukkan bahwa informasi mengenai modal intelektual perusahaan merupakan 5 dari 10 jenis informasi yang dibutuhkan pengguna laporan tahunan perusahaan. Namun, pada kenyataannya tipe informasi yang dipertimbangkan oleh investor tersebut tidak diungkapkan sehingga menyebabkan terjadinya *information gap*. Hal tersebut menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

Kesukarelaan perusahaan dalam melakukan pengungkapan modal intelektual umumnya dipengaruhi beberapa faktor. Teori keagenan menyatakan

bahwa manajer perusahaan yang bertindak sebagai agen memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk menarik investor guna memaksimalkan keuntungannya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil untuk menarik minat investor ialah dengan mengungkapkan segala jenis informasi yang berkaitan dengan semua aktivitas operasional dan non-operasional perusahaan termasuk modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar kepentingan direksi dan komisaris dalam suatu entitas, semakin besar pula tingkat pengungkapan modal intelektual yang dilakukan. Hal serupa juga terjadi jika publik memiliki kepentingan yang besar di dalam entitas. Publik pun akan menuntut sikap transparansi entitas dalam melakukan pengungkapan laporan tahunannya.

Namun tren yang berkembang saat ini menyatakan bahwa tingkat kepemilikan dan ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan indikator pengambilan keputusan dalam melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Bila ditelaah lebih jauh, tingginya kepemilikan saham manajerial seperti tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam menentukan tingkat pengungkapan modal intelektual, begitupun dengan tingginya kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri masih lebih berorientasi pada aset atau sumber daya yang dapat diidentifikasi secara fisik, padahal *knowledge* merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan strategi, menetapkan tujuan perusahaan dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.

Permasalahan ini juga dirasa timbul karena belum adanya standar yang menetapkan *item-item* apa saja yang termasuk dalam aset tak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dikelola, diukur dan dilaporkan, baik dilaporkan secara *mandatory disclosure* maupun *voluntary disclosure*. Selama ini, aset tidak berwujud hanya diatur di dalam PSAK 19 (revisi 2015) namun tidak spesifik mengarah kepada modal intelektual. Padahal menurut Saleh *et al.*, (2007) pengungkapan modal intelektual dapat menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, pengungkapan modal intelektual juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena dapat mengetahui gambaran kinerja dan operasional perusahaan yang sesungguhnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan

investasi terbaik. Yuliasti (2008) menjelaskan bahwa keputusan investasi sangat bergantung pada mutu dan luas pengungkapan yang disajikan pada laporan tahunan.

Bukh *et al.* (2005) menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual merupakan informasi yang bernilai bagi investor, yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan. Pengungkapan dan pelaporan modal intelektual dapat menjadi solusi atas kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang memiliki keunggulan kompetitif yang menyebabkan rendahnya daya saing dan kurangnya kemampuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan (*going concern*).

Mekanisme struktur kepemilikan dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara manajerial dengan publik melalui pengungkapan informasi di laporan tahunan perusahaan. Na'im dan Rakhman (2000) menguji hubungan antara persentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan. Hasil penelitian ini ialah peneliti tidak berhasil menemukan hubungan signifikan antara persentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, Almilia (2008) dan Aulya (2015) menemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan. Bukh *et al.* (2005), Fakhilatun, *et al.* (2009) dan Li dan Qi (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Sementara itu, Soukotta (2012) tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan manajerial dalam hasil penelitiannya.

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor lain dalam menentukan tingkat pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2008) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Namun dalam penelitian Nugroho (2012) tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual.

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengungkapan modal intelektual. Perbedaan atas penelitian-penelitian sebelumnya

terletak pada indeks pengungkapan yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengungkapan modal intelektual dan sampel yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2016. Adanya *information gap* antara kepemilikan saham manajerial dan publik serta kecenderungan faktor ukuran perusahaan dalam mempengaruhi pengungkapan dan pelaporan modal intelektual pada penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi alasan peneliti untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pengungkapan Modal Intelektual?
- b. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Pengungkapan Modal Intelektual?
- c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Modal Intelektual?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Modal Intelektual.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual serta dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi entitas dalam memahami pentingnya pengungkapan modal intelektual dalam *disruptive era* dan meningkatkan transparansi serta kualitas informasi laporan tahunan agar semakin baik kedepannya.

2) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor yang sangat mempertimbangkan pengungkapan serta pelaporan modal intelektual dalam laporan tahunannya sebelum melakukan penanaman modal.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait pelaksanaan kewajiban bagi perusahaan perseroan terbatas maupun perusahaan swasta untuk mengungkapkan pelaporan modal intelektual dalam laporan tahunannya.